

POLITIK FAMILISME DI TUBUH PARTAI ISLAM LOKAL

Laila Kholid Alfirdaus

Universitas Diponegoro

laila.alfirdaus@live.undip.ac.id

Jihan Marsya Azahra

Universitas Diponegoro

hanjihanma@gmail.com

Abstract

Familism and Moslem political parties in Indonesia are inseparable. It is not hard to identify such a practice in parties like Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) and Partai Amanat Nasional (PAN). Those parties are operated by elites, who have familial relationships, either formed by genealogical relationships or by *kiai-santri* (teacher-students). This article supposes to discuss familism and its political implication on party's decision making. Indeed, this article does not reject an idea that familism is not exclusive for Moslem political parties. However, what makes the discussion becomes interesting to elaborate in Moslem parties is related to the social structure that contribute to the construction of familism, called *pesantren* (boarding school). In Moslem parties, familism is not only formed by genealogical relationships (parent-children and relatives), but also sociological ones that is laid in *kiai-santri's* (teacher-students) relations. Its political implication on party's decision making can also be clearly identified clearly as through the structure of party's candidates in elections. The article is based on qualitative research that deployed interviews to party elite and members as data collection methods and is focused on Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rembang regency as a case study. The research found that familism is strongly featured in party's characteristics and party's decision making, as in structuring party's organization, in enlisting candidates in legislature elections, and in other party's decision making.

Keywords: The politics of familism, political implication, kiai, santri and political culture

Abstraksi

Politik familisme dan partai Islam di Indonesia seperti koin yang sisi-sisinya tidak dapat dipisahkan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah contoh-contoh partai yang dapat dikatakan kental dengan karakteristik familisme karena partai dijalankan oleh elit yang memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan santri/murid/jamaah. Artikel ini mendiskusikan politik familisme dengan melacak konteks pembentukan, strukturnya, serta implikasinya terhadap partai secara politik. Tentu saja, artikel ini tidak bermaksud membantah politik serupa di partai nasionalis. Tetapi, akar sosiologis pembentukan familisme dalam partai Islam yang melibatkan pesantren membuat kajian ini menjadi menarik. Struktur familisme tidak hanya terbentuk melalui relasi genealogis (orangtua, anak dan saudara), tetapi juga relasi sosiologis (kiai-santri). Sementara itu, implikasi familisme terasa sekali dalam pengambilan keputusan partai didalamnya. Artikel ini didasarkan pada penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara terhadap elit dan anggota partai dengan studi kasus di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang. Familisme mewarnai PPP termasuk dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di partai, seperti penyusunan struktur kepengurusan partai, penyusunan daftar calon legislatif (caleg), serta pengambilan keputusan penting lainnya.

Kata kunci: Politik familisme, implikasi kebijakan partai, kiai, santri, budaya politik

Pendahuluan

Tulisan ini mendiskusikan politik familisme di partai Islam lokal dengan melacak konteks terbentuknya, struktur familisme di partai serta implikasi politiknya dalam, misalnya, pengambilan keputusan-keputusan partai. Sejauh ini kajian terkait familisme dalam partai-partai di Indonesia tidak cukup banyak. Sebagian besar, kajian sosiologi politik partai-partai lebih banyak fokus pada politik dinasti atau patron-klien (Mietzner, 2012, Choi, 2007, Fukuoka, 2012, and Fukuoka and Djani, 2016). Familisme tidak terlalu berbeda dengan politik dinasti maupun patron klien, dalam hal kepemilikan *privilege* (keistimewaan) yang dimiliki sekelompok kecil orang yang memiliki hubungan dekat, baik karena aspek kekeluargaan maupun aspek sosial yang lain, misal kepemilikan sumberdaya, dalam menentukan keputusan partai (Joseph, 2011). Hanya saja, familisme secara eksplisit merujuk pada hubungan kekeluargaan atau *kinship*, dalam istilah Reallo dan Allik (2008).

Menariknya, dalam partai Islam, hubungan kekeluargaan tersebut tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai hubungan genealogis. Hubungan itu juga terbentuk secara sosiologis melalui relasi kiai-santri yang terbentuk melalui lembaga bernama pesantren, yang sedikit banyak terbawa dan mempengaruhi tatakelola partai. Sebagaimana Fossati (2019), Islam politik yang menekankan keterhubungan santri dan kiai dalam politik kembali menguat pada konteks politik kekinian (Pemilu 2019). Hal ini menjawab anggapan para ilmuwan yang sebelumnya melihat Islam politik di Indonesia seolah memudar (Hamayotsu, 2011).

Sebagaimana diketahui bersama, familisme menjadi corak yang jamak dalam struktur kepartaian di Indonesia, baik partai nasionalis maupun partai-partai berbasis keagamaan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikenal identik dengan keluarga Megawati, dengan pengaruh Taufik Kiemas (suami Megawati) dan Puan Maharani (anak Megawati) yang tidak bisa dilepaskan pengaruhnya didalamnya (Mietzner, 2016). Demikian juga dengan Partai Demokrat, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta keluarga besar serta kolega-kolega purnawirawan yang diketahui memiliki pengaruh yang besar di dalam Partai Demokrat (Aminuddin, 2017). Partai Gerindra yang dibentuk dan dipimpin Prabowo Soebiyanto juga lekat dengan keluarga Djojohadikusumo didalamnya (Purdey, 2016). Hal yang sama terjadi di partai berbasis Islam, baik yang bercorak tradisional maupun modern (Millie, 2013). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dikenal lekat dengan keluarga para pendiri Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur, sementara Partai Amanat Nasional (PAN) identik dengan keluarga besar Amien Rais.

Tetapi, penelidikan lebih dalam tentang bagaimana familisme itu muncul, bagaimana struktur familisme yang terbentuk serta implikasi politiknya belum banyak dikupas, terlebih di tingkat lokal. Artikel ini mencoba mendiskusikan politik familisme di tubuh partai, dengan studi kasus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rembang, sebagai kiblatpartai Islam lokal. Rembang menjadi lokus penting dalam pembahasan Partai Persatuan Pembangunan karena dapat dikatakan Rembang adalah jantung dari partai ini, mengingat dukungan politik yang relatif stabil terhadap partai ini dari waktu ke waktu. Kemerosotan suara PPP di banyak kantong-kantong politiknya, selama bertahun-tahun tidak terjadi di Kabupaten ini. Terlepas bahwa Rembang adalah kantong santri sekaligus Nahdlatul Ulama (NU), keberadaan tokoh-tokoh agama yang kredibilitasnya dikenal luas, baik di tingkat lokal maupun nasional, tetap tidak dapat dilepaskan dalam mendiskusikan PPP, baik di level lokal maupun nasional.

Hal yang jauh lebih menarik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rembang, yang menjadi studi kasus dalam artikel ini, famili (keluarga) mengalami perluasan pengertian,

tidak hanya merujuk pada keluarga besar yang memiliki ikatan darah, tetapi juga merujuk pada mereka yang terikat dalam hubungan kiai-santri yang relasinya sudah mirip seperti keluarga. Tidak hanya anak dan cucu keluarga ini, tetapi juga santri-santri dari keluarga ini, yang kedekatannya sudah seperti keluarga dan menjadi tokoh penting di masyarakat, yang memiliki akses terhadap kebijakan partai. Di samping itu, Rembang menjadi kajian menarik, karena dua keluarga besar di daerah kecil ini, memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan partai baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dua keluarga penting tersebut adalah Kiai Maimoen Zubair (alm.) dan Kiai Ahmad Thoyfoer (alm.).

Artikel ini mendiskusikan familisme dari aspek konteks kemunculannya, struktur familisme yang terbentuk, serta implikasi politiknya. Aspek kemunculan familisme tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial di masyarakat yang bersifat hierarkis yang menempatkan sekelompok keluarga tertentu sebagai pusat di masyarakat. Dalam konteks sosial seperti Rembang yang identik dengan santri dan pesantren, terdapat kecenderungan sosial untuk menempatkan kiai sebagai pusat dalam struktur sosial di masyarakat (Turmuzi, 2006). Kiai-kiai ini tidak hanya memiliki peran di pesantren sebagai guru, tetapi juga di politik praktis sebagai politisi.

Hal ini juga yang sedikit banyak turut berkontribusi dalam pembentukan familisme di tubuh PPP Kabupaten Rembang. Sementara itu, struktur familisme mencakup struktur inti dan pendukung, yang keduanya sama-sama memiliki peran penting di partai. Struktur inti berisi kiai dan keluarga inti kiai, sedangkan struktur pendukung merupakan santri-santri yang menjadi tokoh penting di masyarakat. Sementara itu, implikasi politik terkait dengan kelebihan maupun kekurangan politik familisme dalam penguatan kelembagaan partai, yang bisa ditarik kedalam diskusi penguatan demokrasi secara lebih luas.

Artikel ini disusun secara reflektif dari berbagai literatur tentang sosiologi politik dan budaya politik partai-partai yang ada di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang dikuatkan dengan studi lapangan di Kabupaten Rembang. Sebagai penelitian kualitatif, data lapangan utamanya dikumpulkan melalui observasi yang dilakukan secara partisipatif, peneliti terlibat secara langsung dalam proses sehari-hari dalam pengadministrasian organisasi partai politik, juga wawancara mendalam dengan elit partai baik yang ada di Kabupaten Rembang maupun Provinsi Jawa Tengah, serta mereka yang aktif dalam PPP di pusat (Jakarta), dengan pendekatan studi kasus. Wawancara terutama dilakukan terhadap mereka yang memiliki ikatan kuat dengan dua keluarga besar yang berpengaruh di PPP Kabupaten Rembang (dan Jawa Tengah, juga pusat), maupun dengan santri-santri dan alumni.

Politik Familisme: Diskusi Konseptual

Secara konseptual, politik familisme merujuk pada *privilege* (keistimewaan) yang dimiliki keluarga untuk mengakses keputusan dalam lembaga publik. Joseph (2011) mendefinisikan politik familisme sebagai, “perluasan keluarga sebagai lembaga, ideologi, ikatan, praktik-praktik dan hubungan sosial dalam lembaga publik (negara) oleh individu warga negara guna memenuhi tuntutan (kepentingan pribadi) mereka, maupun oleh aparatur publik (termasuk partai politik) dalam rangka memobilisasi sumberdaya dalam ranah tatakelola lembaga publik guna memelihara *privilege* (keistimewaan) yang mereka miliki.” Dengan demikian, kata kunci politik familisme terletak pada keberadaan famili (keluarga), yang berperan sebagai elit (Pareto, dalam Chalik, 2017), dalam lembaga publik yang memiliki *privilege* (keistimewaan) dalam mengoperasionalkan tatakelola lembaga publik dalam relasi yang sifatnya patron-klien (Agustino 2014).

Dengan demikian, jelas ketika menyebut familisme, pada dasarnya kita tidak meletakkannya secara terpisah dengan konsep patronase, patron-klien, teori elit maupun politik dinasti. Terdapat benang merah di antara konsep-konsep tersebut, yang mengarah pada sekelompok elit dan keistimewaan yang dimiliki. Hanya saja, jika patronase, patron-klien, teori elit dan politik dinasti tidak secara langsung menyebut keluarga, didalam ide familisme, “keluarga” baik dalam pengertian genealogis maupun sosiologis mendapat penekanan eksplisit. Konsep-konsep ini menjelaskan akses kekuasaan yang secara istimewa dimiliki kelompok elit tertentu yang berimplikasi pada kehidupan sosial dan politik secara luas (Roces, 2000).

Tentu saja, politik familisme tidak muncul tiba-tiba tapi terbentuk dalam proses yang panjang, yang bahkan dapat dilacak dalam struktur sosial dan budaya politik yang berkembang di masyarakat. Struktur sosial masyarakat Jawa yang paguyuban dengan menempatkan pemimpin sebagai struktur sentral didalamnya, yang kemudian teradaptasikan dengan baik dalam kehidupan pesantren, menyediakan ruang yang kondusif bagi pembentukan familisme di institusi-institusi modern seperti partai politik.

Budaya Jawa yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan, termasuk dalam hal tatakelola lembaga publik secara formal, juga tidak dapat dilepaskan dari tumbuhnya budaya politik familisme di partai politik. Sebagaimana Almond dan Verba (dalam Gaffar, 2006:99) budaya politik adalah, “sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, dan juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik”. Ini menegaskan bahwa politik familisme tidak hanya tentang elit, tetapi juga tentang budaya politik yang terbangun di

antara warga negara (masyarakat non-elit) yang mendukung beroperasinya familisme secara terus-menerus untuk mengintervensi dan menentukan kehidupan dan nasib politik mereka, hingga membentuk budaya politik yang patrimonial.

Dalam konteks Indonesia, politik familisme itu terpatrit secara jelas selama rezim Orde Baru berkuasa. Bouchier (2015) menyebutkan Suharto menjadi contoh yang paling baik untuk memahami bagaimana familisme membangun ideologi, praktik-praktik bernegara, menentukan akses terhadap sumberdaya, distribusi kesejahteraan, serta menentukan relasi-relasi sosial dan politik yang lebih luas. Orde Baru juga menegaskan bagaimana aparatur negaramenjalankan peran mereka tidak lebih sebagai pelayan sekelompok keluarga bernama Suharto dan kroni-kroninya, guna memenuhi tuntutan kepentingan keluarga ini, yang dimaktubkan dalam kebijakan-kebijakan negara. Hasilnya, politik kekeluargaan menggurita dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi siapa membawa siapa dalam rekrutmen birokrasi maupun partai politik (kandidasi dalam Pemilu) atas nama relasi keluarga.

Namun demikian, familisme sama sekali tidak berarti terkikis ketika Indonesia mulai memasuki era transisi politik menuju era reformasi. Walaupun terdapat beberapa perubahan mendasar, struktur politik masih lekat dengan dinasti, patronase dan kekeluargaan. Bahkan, setelah hampir dua dekade pascareformasi, tidak ada tanda-tanda dalam sistem politik familisme akan berkurang dan membawa demokrasi beralih pada sistem yang benar-benar didasarkan pada nilai-nilai liberal, yang menekankan kebebasan berpendapat dan kompetisi politik terbuka. Pasca reformasi, oligarki makin menguat dan patronase tidak lagi malu-malu muncul di permukaan.

Mengamati korupsi dan patronase yang terus melekat dalam perpolitikan di Indonesia, Warburton dan Aspinall (2019) bahkan mengaitkan ini dengan kemunduran demokrasi. Secara pelan tetapi pasti, sistem ini menggerus nilai-nilai liberalisme dalam demokrasi karena kompetisi terbuka yang mampu menempatkan kandidat-kandidat secara merit dalam persaingan terbuka tidak mudah dijalankan. Semakin lama, mereka yang masuk dan mengendalikan roda kekuasaan dapat diidentifikasi hanya terdapat di segelintir orang dan keluarga elit saja. Dalam tataran ini, Bouchier (2015) selaras dengan Limbu (2011) dalam melihat bahwa ikatan keluarga telah membawa demokrasi kehilangan ruhnya, serta mendorong negara-negara berkembang jauh dari idealitas demokrasi yang bersifat liberal.

Dalam situasi yang demikian, partai Islam ternyata tidak mampu menjadi alternatif. Sebaliknya, partai Islam justru mengambil

bagian di antara lembaga politik yang mengadopsi praktik familisme didalam tata kelola politiknya, dan ulama (kiai), adalah bagian tidak terpisahkan didalamnya. Sebagaimana Dijk (1996) menjelaskan, keberadaan ulama dan politik memang tidak dapat dipisahkan, sejak kemerdekaan hingga politik Indonesia telah memasuki banyak transisi baru. Tentu saja, ulama dalam banyak hal dapat memberikan warna baru bagi partai Islam. Melalui idealisme yang dimiliki, ulama dapat menjadi energi bagi perubahan. Secara internal, setidaknya keberadaan ulama dapat berfungsi sebagai stabilisator dalam partai politik, sehingga berbagai gesekan internal seringkali dapat diminimalisir.

Ulama, seringkali menjadi penjelas keberlanjutan nafas sebuah partai. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, mobilisasi keluarga besar ulama didalam partai politik juga seringkali tidak terhindarkan. Secara sadar atau tidak, mobilisasi ini menggiring partai politik dalam budaya familisme, yang memberikan *privilege* kepada segolongan elit keluarga guna menentukan jalannya partai, mengakses keputusan partai, sekaligus mengakses sumberdaya partai. Menariknya, praktik familisme ini seolah-olah diterima sebagai sesuatu yang *given* bagi masyarakat pemilih, sebagai bagian dari kultur mereka sehari-hari. Di titik inilah, familisme memperoleh penjelasannya. Penelidikan lebih lanjut tentang politik familisme di tubuh partai memperkaya diskusi tentang struktur sosial partai politik di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi secara detil persamaan maupun perbedaan praktik familisme di antara berbagai partai politik yang ada.

Politik Familisme di Tubuh PPP Rembang

Tumbuh kembang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Rembang tidak dapat dipisahkan dari setidaknya tiga keluarga besar kiai kharismatik di daerah tersebut. Ketiga kiai ini adalah Kiai Cholil Bisri (putra alm. Kiai Bisri Mustofa) pemimpin Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin di Leteh, Kecamatan Kota Rembang, Kiai Maimoen Zubair pemimpin Pondok Pesantren Al-Anwar Kecamatan Sarang, Rembang, dan Kiai Ahmad Thoyfoer di Kecamatan Lasem. Tentu saja, ada banyak kiai lain yang berpengaruh dalam tumbuh kembang PPP, seperti kiai-kiai di Kecamatan Sedan, Pamotan, Kragan, dan Sulang. Namun demikian, ketiga keluarga besar kiai di atas, dapat disebut sebagai poros sentral dalam tatakelola PPP di Kabupaten Rembang. Kiai Cholil Bisri adalah tokoh sentral di PPP sampai berdirinya PKB pada tahun 1999, keluarga besar pesantren Roudlotut Tholibin di Kota Rembang turut serta bermigrasi secara kolektif dari PPP ke PKB. Kedua keluarga yang lain, yaitu Kiai Maimoen Zubair dan Kiai Ahmad Thoyfoer masih konsisten di PPP.

Di Sarang, Pondok Pesantren Al-Anwar yang dipimpin Kiai Maimoen Zubair menaungi sekitar 3000 santri dengan puluhan ribu alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, utamanya di Jawa. Al-Anwar tidak hanya memiliki pondok pesantren, tetapi juga sekolah umum dan universitas bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar. Sekolah ini dipimpin langsung oleh anak Kiai Maimoen bernama Abdul Ghofur (Gus Ghofur). Staf pengajar sekolah ini pun beberapa masih keluarga Kiai Maimoen, salah satunya adalah anak menantunya –istri Gus Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah—Ning Nawal yang juga menjadi Bu Nyai di Pondok Putri Al-Anwar. Terdapat pondok pesantren lain yang didirikan para kiai di Sarang yang juga masih keluarga Kiai Maimoen Zubair. Ada juga madrasah atau sekolah umum yang merupakan jaringan Kiai Maimoen, dikenal dengan sebutan MGS (Madrasah Ghozaliyah Syai'fiyah). Madrasah ini merupakan salah satu sekolah yang menyatukan pondok-pondok di Sarang, karena para santri dari berbagai pondok di Sarang bisa mengenyam pendidikan umumnya di MGS ini. Jaringan yang besar inilah yang membuat Sarang menjadi sangat kuat dan mampu mempengaruhi para santri beserta orang tuanya untuk menjadi pendukung PPP.

Sementara itu, melalui Pondok Al-Hamidiyah Lasem, Alm. Kiai Thoyfoer mengembangkan pendidikan Islam di bawah naungan Madrasah Avicenna. Sepeninggal Kiai Thoyfoer, sekolah ini diasuh oleh anaknya, yaitu Gus Luthfi Thomafi. Pengaruh dari keluarga ini di Lasem tak kalah kuatnya dengan Kiai Maimoen di Rembang meskipun sosok Kiai Thoyfoer sudah meninggal. Hal ini disebabkan salah satunya, karena Kiai Thoyfoer masih merupakan keluarga atau kerabat dari Kiai Ma'sum yang sangat terkenal di Rembang, pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayat yang sudah cukup tua usianya. Pondok Al-Hamidiyah sendiri memiliki kurang lebih 1500 santri yang belajar didalamnya (Azahra dan Alfirdaus, 2019). Bukan hanya berbentuk Pondok Pesantren, tetapi juga ada madrasah, taman kanak-kanak dan TPQ di lingkungan pondok. Sebagai seorang kiai dan politisi, pengaruh keluarga Kiai Thoyfoer sangat kuat hingga menurun kepada anak-anaknya. Pengaruh tersebut menyebar kepada seluruh santrinya dan seluruh masyarakat di Lasem, Rembang. Bahkan setelah menjadi anggota dewan, pengaruhnya semakin besar bagi PPP hingga ke tingkat nasional.

Sepeninggal Kiai Thoyfoer, karir politik keluarga ini diteruskan oleh anaknya, Gus Aang di DPR RI, menantunya di DPRD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Gus Aziz, dan manantunya yang lain di DPRD Kabupaten Blora. Relasi keluarga Kiai Thoyfoer dan turunan Kiai Ma'sum masih terjaga dengan baik sekaligus merekatkan ikatan batin dalam urusan kepartaian. Kedekatan Gus Aang dengan turunan dari Kiai Ma'sum ini dibuktikan ketika perayaan satu abad berdirinya pondok ini, Gus Aang salah satu orang yang meresmikannya mewakili

dari pondok tersebut. Iajuga dikenal dekat dengan para santri Al-Hidayat melalui dukungan kegiatan yang dilakukan oleh santri. Hal ini berdampak pada popularitasnya di kalangan para santri. Oleh karena itu, pondok Kiai Ma'sum yang sudah berumur hingga satu abad ini menjadi salah satu kekuatan dari Gus Aang –Arwani Thomafi putra Kiai Thoyfoer—untuk tetap mempertahankan posisi PPP di Lasem. Ia bersama dengan Kiai Maimoen, bagaimanapun menjadi tonggak pengaman suara PPP di wilayah Rembang dan Jawa Tengah pada umumnya. Sehingga tidak heran, jika Gus Aang dan keluarga Kiai Maimoen memiliki hubungan yang dekat selayaknya anak sendiri.

Dari paparan atas terbaca ada transfer tradisi dari pesantren, khususnya NU, ke partai politik yang tidak terhindarkan. Pemimpin partai bagi masyarakat adalah sekaligus juga pemimpin agama mereka, karena pandangan politik para pemimpin partai selayaknya nasehat (fatwa). Jika sebelum era reformasi Kiai Cholil Bisri adalah ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP sekaligus panutan dalam kehidupan politik dan sosial bagi masyarakat, setelah itu, terdapat Kiai Ahmad Thoyfoer. Di Rembang sendiri, Kiai Thoyfoer dianggap sebagai guru, tidak hanya dalam hal keagamaan, tetapi juga dalam hal politik. Konsistensinya memperjuangkan idealisme umat, jika bisa disebut demikian, pada masa itu, menjadi rujukan masyarakat dalam memberikan dukungan.

Setelah berhasil membangun karir politik di tingkat provinsi (DPW), kepemimpinan DPC PPP oleh Kiai Thoyfoer, kemudian digantikan oleh Gus Ubab (putra Kiai Maimoen Zubaer), dilanjutkan Gus Aziz (menantu Kiai Ahmad Thoyfoer) dan, kemudian Gus Kamil (putra Kiai Maimoen Zubaer), hingga saat ini. Kiai Ahmad Thoyfoer bahkan berhasil memegang kepemimpinan di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Jawa Tengah sampai meninggalnya pada tahun 2007/2008.

Jajaran kepengurusan lain di DPC (termasuk DPW) yang disusun untuk mendukung kepemimpinan para sanak keluarga Kiai Maimoen dan Kiai Thoyfoer di posisi sekretaris, bendahara, maupun bagian-bagian lain, umumnya adalah kiai-kiai di Rembang yang lain, yang dulunya juga merupakan santri-santri dari Kiai Bisri Mustofa (ayah Kiai Cholil Bisri) maupun Kiai Zubaer (ayah Kiai Maimoen) dan Kiai Maimoen sendiri. Di tingkat anak cabang (tingkat kecamatan) dan ranting (tingkat desa), kepengurusan PPP juga diisi oleh santri-santri yang sudah lulus dan mengabdikan di masyarakat dan menjadi tokoh di masyarakat. Pemilih PPP adalah keluarga besar, tetangga yang sekaligus menjadi santri para pengurus PPP di lingkungan masing-masing (melalui masjid, mushola dan pengajian), sekaligus murid-murid di madrasah yang diasuh para alumni pesantren-pesantren ini.

Dengan demikian, berbicara partai dan pemilih dalam konteks PPP Kabupaten Rembang tidak bisa dibayangkan seperti partai dan pemilih yang rasional yang semata-mata memilih partai karena kesamaan ideologi dan visi misi ke depan. Tidak dapat dipungkiri, familisme yang berkembang dari keluarga inti para kiai, santri-santri mereka, serta santrinya para santri mereka, telah membangun ikatan batin yang melampaui kesadaran rasional akan fungsi dan peran partai dalam kehidupan politik warga negara yang modern. PPP, dalam kacamata yang lain, telah membangun semacam kesadaran identitas politik bersama-sama dengan identitas kesantrian yang terbangun di antara para pemilihnya. Dengan demikian, menjadi terjelaskan, misalnya, mengapa ketika dukungan masyarakat terhadap PPP cenderung menurun dari waktu ke waktu, hal yang sama relatif tidak terjadi di Kabupaten Rembang. Jikapun tidak menjadi yang terbesar suaranya, PPP selalu berhasil memperoleh suara kedua atau ketiga terbesar di daerah tersebut.

Struktur Politik Familisme

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi jelas bahwa struktur familisme di tubuh partai Islam lokal terdiri dari dua komponen utama. *Pertama* adalah struktur genealogis yang terbentuk melalui ikatan darah, sebagai struktur inti. *Kedua* adalah struktur sosiologis yang terbentuk berdasarkan hubungan kiai-santri atau guru-murid, sebagai struktur pendukung yang tetap signifikan peran politiknya. Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam relasi familisme, baik yang berbasis keluarga maupun berbasis relasi kiai-santri, keluarga Kiai Thoyfoer dan Kiai Maimoen Zubair adalah kunci.

Penjelas genealogis politik familisme pertama-tama dapat dilacak dari karir politik Kiai Thoyfoer. KH. Achmad Thoyfoer menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan selama dua periode dari tahun 1999-2006. Dia juga seorang menjadi anggota dewan Komisi VIII DPR RI periode 2004-2009 (Munadjat, 2007). Kiai Thoyfoer dikenal sebagai orang yang kritis kepada pemerintah terutama saat dirinya menjabat sebagai anggota dewan, baik di DPRD Provinsi Jawa Tengah maupun DPR RI. Selain kritis, dia juga dikenal sangat santun dan bersih dalam berpolitik.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu kerabatnya, Kiai Thoyfoer sendiri melarang seluruh anaknya untuk terjun ke politik (dalam artian menjadi anggota legislatif) selama ia masih menjadi pejabat partai. Anak-anak Kiai Thoyfoer hanya diizinkan untuk berpartisipasi dalam rangka meramaikan masa-masa politik, bukan untuk masuk kedalam kandidasi. Dedikasi Kiai Thoyfoer ini yang kemudian mendorong pengurus partai membalas budi kepada

keluarga Kiai Thoyfoer sepeninggalnya dengan memberikan peluang bagi anak-anak dan keluarga Kiai Thoyfoer untuk terjun ke politik praktis hingga saat ini. Karena larangan inilah, relasi familisme keluarga KH. Thoyfoer terbangun justru setelah meninggal dunia. Secara rinci, keluarga Kiai Thoyfoer yang berkarir di politik dapat dijelaskan di tabel berikut:

Tabel 1. Keluarga Kiai Thoyfoer di PPP

Nama	Tahun	Jabatan
Arwani Thomafi (Putra Kandung)	2003	-Wakil Sekretaris DPC PPP Rembang -Ketua Lembaga Ma'arif NU
	2007	Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP
	2009	Periode I: Anggota DPR RI Komisi VIII Bidang Sosial dan Agama
	2011	Periode I: Anggota DPR RI Komisi V Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum
	2012	Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi Media
	2014	Periode II: Anggota DPR RI Komisi II Bidang Kemitraan dalam Negeri, Bawaslu dan KPU, serta BPN
	2015	Periode II: -Anggota DPR RI Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri -Ketua Fraksi PPP MPR RI
	2016-sekarang	Wakil Ketua Umum DPP PPP
	2019	Periode III: Anggota DPR RI 2019-2024
Abdul Azis (Menantu)	1995	Kader PPP Rembang
	1997	Sekretaris PAC PPP Kec. Lasem Rembang
	1999-2004	-Sekertaris DPC PPP Rembang -Majelis Pertimbangan PAC PPP Kec. Kaliori

	2005	Ketua DPC PPP Rembang
	2009	-Wakil Bendahara DPW PPP Jawa Tengah -Periode I: Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
	2014	-Wakil Ketua I DPW PPP Jawa Tengah -Periode II: Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah PPP
	2019-sekarang	Periode III: Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Fraksi PPP 2019-2024
Hj. Raudlotul Jannah Thomafy (Putri Kandung)	2016	Ketua Wanita Persatuan Pembangunan (prediksi sejak sebelum 2016)
	2016-2021	Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPC PPP Rembang
Nyai Muhimmah Thoyfoer (istri)	2016-2021	Wakil Ketua Majelis Syariah DPC PPP Rembang (prediksi sejak sebelum 2016)
Nadia Fathimah Thomafy (putri kandung)	2019	Calon Legislatif DPR RI dari PPP (belum berhasil)
Lathifah (menantu- istri Gus Aang)	2009	Wanita Persatuan Pembangunan
M. Faizal (menantu)	2019-2024	Anggota DPRD Kabupaten Blora

Sumber: Azahra dan Alfirdaus (2019)

Praktik familisme dalam keluarga Kiai Maimoen Zubair juga tidak kalah menarik didiskusikan. Kiai Maimoen memiliki 15 putra dan putri, 5 diantaranya sudah meninggal (Faishal, 2010). Dari ke sepuluh putra tersebut, ada empat putra yang terjun ke politik. Dua putra diantaranya masih bertahan hingga sekarang. Keempat putranya yang fokus ke politik yaitu Gus Ubab, Gus Najih, Gus Kamil, dan Gus Yasin. Gus Ubab dan Gus Najih sudah tidak aktif lagi saat ini. Posisi Gus Ubab pada akhirnya digantikan oleh anaknya, yaitu Gus Rojih, yang maju pada pileg 2019. Sedangkan Gus Najih

lebih fokus pada kegiatan pondok dan kiai. Putra Kiai Maimoen yang bertahan di politik hingga saat ini adalah Gus Kamil dan Gus Yasin. Jika kita runtutkan kedalam tabel secara singkat, maka keluarga Kiai Maimoen adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Keluarga KH. Maimoen Zubair di PPP

Nama	Tahun	Jabatan
KH. Ubab Maimoen Zubair	1997-1999	Anggota DPR RI PPP (pada masa orba)
	1999-2004	-Ketua DPC PPP Kabupaten Rembang -Anggota DPRD Jawa Tengah fraksi PPP
	2004-2015	-Ketua Majelis Pertimbangan DPW PPP Jawa Tengah
	2016-sekarang	-Ketua Majelis Syariah DPW PPP Jawa Tengah
	-	Pernah juga menjadi DPRD Kabupaten Rembang
KH. Najih Maimoen Zubair	1999-2004	Ketua Majelis Pertimbangan PAC Kecamatan Sarang
KH. Majid Kamil Maimoen	2009-2016	Ketua DPC PPP Rembang
	2009-2014	Anggota DPRD Rembang Fraksi PPP
	2016-2019	Ketua DPRD PPP Rembang
	2014-2019	Ketua DPRD Kabupaten Rembang
	2019-sekarang	Anggota DPRD Rembang (baru terpilih pada periode ke 3)
Taj Yasin Maimoen	2009	-Ketua PAC PPP Kec. Sarang Kab. Rembang -Caleg DPRD Provinsi Jateng
	2009-2014	-Wakil Ketua Bidang Keagamaan DPW PPP Jawa Tengah
	2014-2019	-Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

		-Wakil Ketua Umum DPW PPP Jawa Tengah
	2017-2022	-Ketua DPC PPP Kab. Jepara
	2019-sekarang	-Wakil Gubernur Jawa Tengah -Wakil Bendahara DPP PPP
Wafi Maimoen Zubair	2016-2021	-Ketua DPW PPP Jawa Tengah versi Djan Faridz
Rojih Ubab Maimoen	2019-sekarang	-Anggota DPR RI dapil Jateng 2
Nyai Heni Maryam	2016-sekarang	-Wakil Ketua Majelis Syariah DPC PPP Rembang

Sumber: Azahra dan Alfirdaus (2019)

Sebagaimana keluarga Kiai Thoyfoer, keluarga Kiai Maimoen juga memiliki karir politik di masing-masing wilayah. Gus Najih fokus di PAC PPP di Kecamatan Sarang, Gus Kamil fokus di daerah kabupaten bersama Ibunya, dan Gus Yasin di provinsi maupun pusat dan daerah lainnya di Jawa Tengah, bersama-sama dengan Gus Rojih yang merupakan putra Gus Ubab, sekaligus cucu Kiai Maimoen.

Kedua, selain relasi familisme berdasarkan hubungan genealogis, struktur familisme berdasarkan relasi sosiologis juga menarik didiskusikan. Sebagian besar para pengurus DPC PPP di Kabupaten Rembang, maupun PAC dan ranting di kecamatan dan desa juga diisi oleh para santri Sarang dan Lasem (maupun Rembang). Di antara santri-santri tersebut, tidak sedikit juga yang berhasil duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang. Bahkan, salah satu santrinya, yaitu Kiai Abdul Hafidz (dikenal sebagai Mbah Hafidz), saat ini berhasil menduduki jabatan bupati di Kabupaten Rembang. Sebelumnya, Kiai Abdul Hafidz adalah anggota DPRD Kabupaten Rembang sejak tahun 1999 sampai 2009 (dan 2010). Pada tahun 2010, Kiai Abdul Hafidz terpilih sebagai wakil bupati mendampingi Bupati Salim yang terpilih melalui pemilihan langsung. Mbah Hafidz kemudian menggantikan Bupati Salim setelah yang bersangkutan dikenai hukuman karena kasus korupsi pada tahun 2013. Pada tahun 2015, Mbah Hafidz mencalonkan diri bersama pengusaha muda di Rembang, bernama Bayu Andrianto, dalam Pilkada, dan memenangkan pemilihan secara signifikan.

Jika Kiai Maimoen memiliki santri di pesantren yang kemudian berkarir di politik, Kiai Thoyfoer memiliki santri politik yang ditempa dan didukung untuk berkarir di PPP. Di antara tokoh-tokoh penting yang merupakan santri politik Kiai Thoyfoer adalah Suryadharma Ali yang berhasil menduduki jabatan sebagai ketua

DPP PPP, lalu mendapat restu Kiai Maimoen untuk duduk di kabinet SBY 2004-2009, juga sebelumnya Hamzah Haz yang berhasil menjadi ketua DPP PPP, lalu wakil presiden Megawati setelah menggantikan Gus Dur. Sampai saat ini, santri-santri Kiai Thoyfoer maupun Kiai Maimoen masih memegang posisi penting di PPP dan sebagian juga menjabat di DPRD Kabupaten Rembang yang terpilih melalui Pemilu 2019.

Implikasi Politik

Relasi kiai-santri menciptakan kultur budaya yang khas di internal partai Islam, khususnya PPP. Relasi yang dibangun ini menjadi pondasi utama bagaimana PPP masih bisa bertahan sampai saat ini meskipun telah mengalami berbagai konflik internal yang membuat partai tersebut terpecah dan banyak menciptakan partai baru setelah beberapa tokohnya keluar dari PPP. Relasi yang kuat antara kiai dan santri ini secara tidak sadar membawa kultur yang serupa didalam partai politik, khususnya PPP, di era modern sekarang ini.

Kultur budaya yang dibawa para santri adalah kultur "*nderek dawuhe kiai*" karena santri menempatkan diri mereka untuk patuh kepada kiai. Mereka juga menempatkan kiai sebagai rujukan dalam kehidupan sosial dan politik mereka. Jika dilacak lebih jauh, di pondok pesantren, para santri diajarkan untuk patuh dan taat kepada orang tua, dan kiai sebagai orang tua mereka di pondok adalah orang yang wajib ditaati. Tentu saja, sikap kepatuhan di pesantren ini ditujukan untuk membangun budi pekerti. Hasilnya, santri memang terbentuk menjadi orang yang penurut, sopan, taat dan patuh. Bagi kehidupan sehari-hari mereka, kepatuhan ini dianggap sebagai keberkahan yang mendatangkan pahala. Jika tidak patuh kepada para kiai, mereka percaya akan mendatangkan dosa bagi mereka.

Kepatuhan yang dilakukan para santri ini juga membawa mereka dalam kepatuhan berpolitik. Karena beberapa kiai juga ada yang terjun ke politik, maka tidak salah jika para santri juga mengikuti jejak kiainya. Termasuk dalam hal yang sangat mendasar sekalipun dalam berpolitik, yaitu menentukan pilihan. Sebagai masyarakat yang mungkin tidak mengenal secara langsung siapa wakil rakyatnya atau kepala daerahnya, tentu setiap orang membutuhkan arahan yang bisa menuntun kepada siapa pilihan mereka dijatuhkan. Bagi para santri tidak lain dan tidak bukan, tuntunan itu terdapat di kiainya. Dengan demikian, dapat dipastikan apa yang menjadi pilihan kiai biasanya menjadi pilihan politik para santri juga.

Menurut salah satu informan salah satu santri Rembang bahwa bagi santri itu tidak usah dikampanyekan pasti patuh

kepada kiainya, tidak ada yang berani macam-macam, mereka pasti patuh kepada kiai,

“Santri iku gak usah di kampanyekan yawes manut kiaine, pokoke gak nyeleneh-nyeleneh manut kiaine.”(Ahmad, Wawancara, Maret 2018)

Merespon hal ini, salah seorang kerabat Kiai Maimoen menambahkan,

“Ada masalah keluarga tanya ke kita, ekonomi pun tanya ke kita bagaimana... iya termasuk politik, dan ora politik tok mbak (tidak hanya politik). Jodoh juga tanyanya ke Pak Kiai.”(Gus Yasin, Wawancara, Februari 2018)

Dalam pengertian inilah relasi kiai-santri dapat menjelaskan definisi familisme yang meluas tidak hanya dalam pengertian genealogis, tetapi juga sosiologis, karena relasi kiai-santri lebih bercorak kekeluargaan daripada *ansich* bicara tentang patron-klien yang berbasis penguasaan dan akses sumber daya (ekonomi dan politik).

Secara konkret, lebih jauh politik familisme ini termanifestasi setidaknya dalam penentuan struktur kepengurusan partai, kandidat dalam pemilu legislatif, kandidat Pilkada, dan aspek lain, terkait pengambilan keputusan politik partai, didalam hal-hal selain pencalonan. Terkait dengan penentuan struktur kepengurusan, salah seorang informan, pengurus DPW PPP Jateng menjelaskan,

“Ya tetep nanti PAC-PAC memilih ketua DPC ya ketua PAC punya peran, DPC-DPC memilih ketua DPW ya ketua DPC punya peran, dan seterusnya. Tapi beliau(kiai) selalu punya peran untuk dimintai pertimbangan.”(Abdul Aziz, Wawancara, Maret 2018)

Seorang informan dari pengurus DPC PPP Rembang menambahkan,

“Untuk jadi ketua memang ada unsur, harus kiai atau keturunannya. Memang secara administratif tidak ada, tetapi adanya secara moral itu yang dibutuhkan. Karena itu, seorang pemimpin membutuhkan simbol dan ‘ruh’ (keturunan) yang kuat kan, untuk bisa dikenal atau dipercaya masyarakat. Nah, kalau di PPP ya itu keluarga kiai itu.”(M. Huda, Wawancara, April 2018)

Peran para keluarga kiai dalam pencalonan legislatif maupun di Pilkada, juga dapat menjelaskan implikasi politik familisme. Dalam susunan anggota legislatif di Kabupaten Rembang dapat dikatakan setidaknya salah satu keluarga Kiai Thoyfoer atau Kiai Maimoen, maupun santri-santrinya, yang akan menempati posisi sebagai anggota dewan. Saat ini, keluarga Kiai Maimoen yang menjadi anggota dewan di Kabupaten Rembang adalah Gus Kamil. Dalam pemilu 2019, terdapat juga beberapa santri Sarang yang terpilih, misalnya Kiai Abdul Rouf di Dapil Pamotan-Sale. Seorang informan

menguatkan analisis ini, bahwa susunan calon anggota legislatif yang diprediksi terpilih (ditempatkan di nomor urut 1) harus memenuhi beberapa unsur, yaitu kiai atau anak kiai, orang yang memiliki kapabilitas profesional, dan yang ketiga orang yang memiliki kapasitas sumber daya ekonomi.

Tentu saja, tidak semua proses politik ini berjalan lancar, meski politik familisme dianggap mampu merekatkan semua anggota partai. Kadang-kadang, ketegangan juga muncul. Pada Pemilu 2014, misalnya, beberapa orang yang bermaksud mempromosikan Gus Wafa, anak dari Bupati Rembang, yaitu Mbah Hafidz, untuk maju dalam Pileg Provinsi Jateng dan ditempatkan di nomor urut 1, terpaksa menerima keputusan DPW yang memilih memberikan dukungan kepada Gus Aziz. Sebagaimana wawancara terhadap salah satu informan, keputusan DPW diambil mengingat Gus Aziz dipandang jauh lebih berpengalaman dan memiliki peluang menang lebih besar, sehingga Gus Wafa pun batal dicalonkan di DPRD Provinsi dengan nomor urut 1. Mengatasi hal ini, tentu saja, menjadi tidak mudah. Namun, pada akhirnya, partai akan mengacu pada kandidat yang jauh lebih kuat trah politiknya serta lebih mapan pengalamannya. Dalam kontestasi politik, ini adalah keputusan yang masuk akal. Konstituen sudah lebih familiar dengan kandidat yang ada.

Penutup

Diskusi tentang politik familisme di Partai Persatuan Kabupaten Rembang ini menjelaskan kepada kita bahwa betapa partai sebagai lembaga modern tetap tidak pernah bisa lepas dari budaya politik. Budaya itu dapat mewujudkan dalam beragam bentuk, baik politik dinasti, patron-klien dan familisme. Praktik familisme di tubuh PPP Kabupaten Rembang ini menjadi pelajaran menarik bahwa partai bertumbuh dari budaya masyarakat serta struktur sosial yang terbentuk di masyarakat. Dalam kaitannya dengan PPP Kabupaten Rembang, politik familisme itu tumbuh dari budaya dan tradisi pesantren, karena kiai dan keluarga besarta mengisi struktur inti kepartaian, dan relasi kiai-santri memperkuat struktur familisme kepartaian didalamnya.

Tentu saja, bayangan tentang idealitas partai politik adalah lembaga yang modern yang dikelola secara profesional dan berbasis pada ideologi yang visioner ke depan. Kenyataannya memang tidak selalu demikian, bahkan ketika perubahan sosial sudah sangat pesat dan membentuk masyarakat digital. Partai-partai di Indonesia cukup lambat menata ulang dirinya ketika lembaga lain, seperti birokrasi, kampus bahkan militer, secara bertahap membenahi diri melalui reformasi sistem. Memang, menegaskan penguatan profesionalisme partai sebagai salah satu tawaran solusi tidak semudah membalik

telapak tangan. Tetapi, bagaimanapun, partai-partai, terlebih yang bercorak Islam, seperti PPP, mesti mampu membangun tatakelola yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.

Daftar Rujukan

Ackelsberg, Martha and Mary N. Shanley. 2015. "Jean Elshtain on Families and Politics", *Politics and Gender* Vol. 11 No. 3, 570-578.

Aminuddin, M Faishal. 2017. "The Purnawirawan and Party Development in Post- Authoritarian Indonesia, 1998–2014", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 36, No. 2, 3–30.

Azahra, Jihan Marsya Dan Alfirdaus, Laila Kholid. 2019. "Politik Familisme di Tubuh Partai Islam Lokal: Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Kabupaten Rembang", *Journal of Politics And Government Studies*, Vol. 8, No. 3, 1-14.

Bathoro, Alim. 2011. "Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Fisip Umrah*, Vol. 2, No.2, 115-125.

Bourchier, David. 2015. *Illiberal democracy in Indonesia: The Ideology of the Family-state*. New York: Routledge.

Chalik, Abdul. 2017. *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Choi, Nankyung. 2012. "Elections, parties and elites in Indonesia's local politics", *South East Asia Research*, Vol. 15, No. 3, 325–354.

Creswell, John W. 1994. *Research Design*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.

C. Van Dijk. 1996. "Ulama And Politics", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 152, No. 1, 109- 143.

Denzelot, Jacques. 1997. *The Policing of Family*. Baltimore: Patheon Books.

Jati, Wasisto Raharjo. 2013. "Rivalvisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 203-231.

Jati, Wasisto Raharjo. 2013. *Ulama dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama.*, Yogyakarta: IMPULSE dan Buku Pintar.

Fahmi, Muhammad Aris. 2014. *Relasi Partai Politik Basis Massa: Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan dengan Pondok Pesatren Al-Anwar Sarang*. Malang: Tesis Universitas Brawijaya.

Faishal, M. 2010. *Biografi Maimoen Zubair*. Semarang: Tesis UIN Walisongo.

Fathoni, Rifai Shodiq. 2016. *Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 1930-1971M. Wawasan sejarah: Sejarah Indonesia*.

Fossati, Diego. 2019. "The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 38, No. 2, 119–148.

Fukuoka, Yuki. 2013. "Oligarchy and Democracy in Post-Suharto Indonesia", *Political Studies Review*, Vol. 11, 52–64.

Fukuoka, Yuki dan Luky Djani. 2016. "Revisiting the rise of Jokowi: The triumph of reformasi or an oligarchic adaptation of post-clientelist initiatives?", *South East Asia Research*, Vol. 24, No. 2, 204–221.

Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hamayotsu, Kikue. 2011. "The End of Political Islam? A Comparative Analysis of Religious Parties in the Muslim Democracy of Indonesia", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 30, No. 3, 133-159.

Harjanto, Nico. 2011. "Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik Indonesia", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 2, No. 2, 138-159.

Isra, Saldi. 2017. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Publishing.

Joseph, Suad. 2011. "Political Familism in Lebanon", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 636, 150-163.

Kamarudin. 2013. "Konflik Internal Partai Politik: Studi kasus Partai Kebangkitan Bangsa", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 1, 29-39.

Kartz, Richard S. dan William Crotty. 2014. *Handbook of Party Politics*. Bandung: Nusa Media.

Limbu, Bishupal. 2011. "Democracy, Perhaps: Collectivity, Kinship, and the Politics of Friendship", *Comparative Literature*, Vol. 63, No. 1, 86-110.

LKPI. 2014. *Politik Kekeluargaan dan Kekuasaan yang Berpusat Pada Tubuh*. Indoprogess.com. diakses pada 10 September 2017 pukul 01.32 WIB

Millie, Julian. 2013. "The situated listener as problem: 'Modern' and 'traditional' subjects in Muslim Indonesia", *International Journal of Cultural Studies*, Vol. 16, No. 3, 271–288

- Mietzner, Marcus. 2012. "Ideology, money and dynastic leadership: the Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998–2012", *South East Asia Research*, Vol. 20, No. 4, 511–531.
- Mulyawan, Budi. 2015. "Budaya Politik Masyarakat Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Politik", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5 No.2, 1-14.
- Mietzner, Marcus. 2016. "The Sukarno dynasty in Indonesia: Between institutionalisation, ideological continuity and crises of succession", *South East Asia Research*, Vol. 24, No. 3, 355–368.
- Noeh, Munawar Fuad. 2014. *Kyai di Panggung Pemilu dari Kyai Khos sampai Kyai High Cost*. Jakarta: Rene Book.
- Purdey, Jemma. 2016. "Narratives to power: The case of the Djojohadikusumo family dynasty over four generations", *South East Asia Research*, Vol. 24, No. 3, 369–385.
- Realo, Anu dan Allik, Jüri. 2008. "Radius of Trust Social Capital in Relation to Familism and Institutional Collectivism", Vol. 39, No. 4, 447-462.
- Roces, Mina. 2000. "Kinship Politics in Post-War Philippines: The Lopez Family, 1945-1989", *Modern Asian Studies*, Vol. 34, No. 1, 181-221.
- Sari, Hendro Fadli. 2016. *Perilaku Politik Elit & Hubungan Kiai-Santri: Dukungan Politik Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang Terhadap Pilgub Jatim 2013*. Surabaya: Skripsi Universitas Airlangga.
- Savirani, Amalinda. 2016. "Survival against the odds: The Djunaid family of Pekalongan, Central Java", *South East Asia Research*, Vol. 24, No. 3, 407–419.
- Titin Purwaningsih, 2012, *Politik Kekerabatan dalam Politik Lokal di Sulawesi Selatan pada Era Reformasi: Studi tentang Rekrutmen Politik pada Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009*. Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia
- Turmudi, Endang. 2006. *Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. Canberra: ANU Press.
- Warburton, Eve dan Aspinall, Edward. 2019. "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion", *Contemporary Southeast Asia* Vol. 41, No. 2, 255–85.